

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI DI KANTOR PENGELOLAAN DATA TELEMATIKA KABUPATEN BANTUL

Sri Utami

Abstract

This study aims to describe institution development of Information and Communication Technologies by Office Pengolahan Data Telematika (KPDT) of Bantul Government. This study is conducted through qualitative descriptive approach, with data collection technique through: interviews, observation, and analyzing documents. The researcher uses the theory by Djunaedi (2006), that metamorfosis of information and communication technology institution generally are 3 type: A Type: centralitation; B Type: Distributed; C Type: Integrated.

The results show the institutional development of Information and Communication Technology by KPDT Bantul are in Type B: distributed. Here's some proof of the success of the ministry, Bantul, which awards: 1). Warta Ekonomi E-Government Award Nominee 10, 2004; 2). Depdagri Innovation Favorite website E-Government Award 2005; 3). Warta Ekonomi E-Government Award best website category of District 2008; 4). User Friendly on E-Government Award 2009; 5). Innovation in E-Government Website Award 2009; 6). Category "Averall Society" Development of e-government in 2012; 7). Category "Averall Society" Indonesia Digital Society Award (IDSA) Runner UP, 2014; 8). Highest rating first winning Performance Evaluation SKPD, 2015.

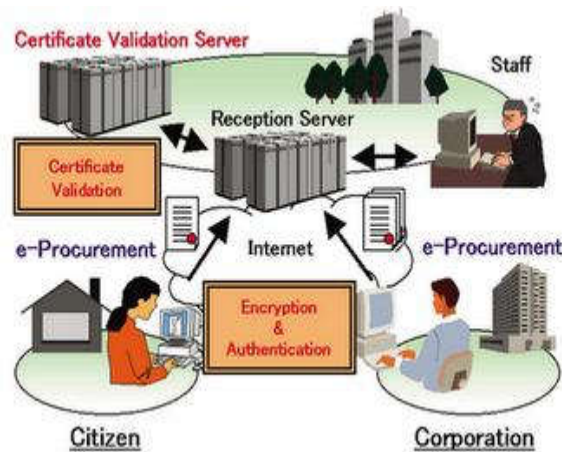
Key word: Institution Development, Information and Communication Technologies

Latar Belakang

Di Indonesia, reformasi birokrasi diimplementasikan mulai tahun 2000 yang dimulai dengan program-program seperti desentralisasi, deregulasi dan debirokrasi, penggabungan atau penghapusan organisasi, perbaikan sistem kepegawaian, peningkatan kemampuan birokrat, pembenahan sistem manajemen keuangan, informasi, sistem pelayanan publik dan sebagainya. Tuntutan masyarakat akan terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, merupakan langkah awal melaksanakan perubahan secara efektif yang sesuai kepentingan masyarakat luas dalam bentuk pelayanan prima. Dalam rangka pemenuhan tuntutan tersebut memerlukan

senegitas komitmen antar *steakholder* serta upaya pemenuhan sarana prasarana pendukung dan ketersediaan data dan informasi secara cepat, mudah, dan berkualitas yang dapat dimanfaatkan bersama-sama. Pemanfaatan data bersama yang terintegrasi merupakan langkah dan tujuan yang paling strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-Government/e-Gov*). *E-Gov* adalah penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain yang mampu mewujudkan/menghasilkan hubungan baru seperti: *Government to Citizen (G2C)*, *Government to Business Enterprises (G2B)*, dan *inter-agency relationship (G2G)*. Hubungan dan jaringan kerja dalam membentuk *e-Gov* dapat digambarkan sbb:

Gambar 1: Perwujudan hubungan dalam *e-Gov*.



Pemanfaatan TI memungkinkan untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu ketika masyarakat mendambakan terwujudnya reformasi sektor publik, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-gov*. Secara langsung maupun tidak langsung pemerintah dituntut untuk dapat mengembangkan Sistem Manajemen (SM) organisasi jaringan sebagai upaya memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. Di samping itu organisasi pemerintah juga harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (*public-private partnership*). Dari hasil pengamatan di lapangan ditemukan beberapa

faktor yang mendorong pemerintah mewujudkan *e-Gov*, di antaranya: 1). Dorongan terhadap diwujudkannya pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung-jawab, responsif, efektif dan efisien, secepat-cepatnya; 2). Kemajuan TIK dan pemanfaatannya pada aspek pemerintahan; 3). Ancaman *digital divide*, terkucil dari kecenderungan global; 4). Peningkatan daya saing.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul berupaya mewujudkan *e-gov* secara menyeluruh sebagai upaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Kantor Pengolahan Data Telematika (KPDT) Kabupaten Bantul sangat mendukung kebijakan untuk segera mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK dalam peningkatan pelayanan publik. Namun demikian Pemkab Bantul menghadapi permasalahan berikut dalam implementasi *e-gov* (PAP Bantul, 2008): 1). Aturan pengembangan Sistem Informasi (SI) Pusat yang mengikat dan kurang memperhatikan kondisi daerah (pengawasan, pengendalian operasional dan implementasi kurang diperhatikan); 2). Ketersediaan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang TIK sangat terbatas; 3). Komitmen pimpinan daerah untuk pengembangan SI, kurang (*e-gov* bukan sebagai program utama), sehingga ketersediaan dana untuk pengadaan *hardware* dan pembangunan infrastruktur/Sistem TIK dikesampingkan; 4). Aturan dan prosedur (SOP) belum ada, padahal sangat diperlukan untuk penyamaan persepsi dan menyatukan tujuan pengembangan *e-gov*; 5). Belum semua *top leader* merasakan pentingnya ketersediaan data dan informasi.

Mengacu pengalaman negara lain, Kabupaten Bantul menetapkan kondisi yang dianggap menjadi ukuran keberhasilan program pengembangan TIK (PAP Bantul 2008) adalah sbb: 1). Terintegrasi dengan pengembangan prasarana, aplikasi dan ketrampilan/pendidikan yang tepat; 2). Bagian dari *government reform*, dilaksanakan dalam konteks proses perubahan institusional dan bisnis; 3). Diperlukan iklim kebijakan yang mendukung investasi di bidang TIK dan kepercayaan penggunaan TIK transaksi ekonomi; 4). Terus menerus dilakukan monev agar efektif. Berdasarkan latar

belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan ini menjadi tema Pengembangan Kelembagaan TIK oleh KPDT Kabupaten Bantul.

Tinjauan Pustaka

Pengembangan Kelembagaan TIK

Kemajuan peradaban manusia menurut Alvin Tofler dibagi dalam 4 tahapan: 1). Gelombang 0, masa ketika manusia masih bergantung kepada alam, belum mengenal budidaya, bersifat nomaden; 2). Gelombang 1, manusia sudah mulai berfikir untuk menghasilkan bahan makanan, karena jumlah manusia semakin banyak, faktor rumah juga mendorong munculnya teknologi untuk menghasilkan makanan tanpa berpindah tempat. Selanjutnya orang terus terdorong untuk menemukan berbagai alat sebagai pengganti tenaga manusia, hingga sampai pada era revolusi industri; 3). Gelombang 2, orang menyadari peran modal, dan untuk mengelolanya diperlukan kecerdasan, sehingga pada gelombang ini orang berotak cerdas sangat dihargai daripada yang berotak kuat; 4). Akhirnya orang berfikir untuk menemukan alat yang dapat menggantikan/ menghasilkan daya seperti akal manusia, hingga pada 1945 lahirlah komputer yang dinamakan *Eniac* ciptaan Prof. Mauchly & Eckert. Penemuan ini mengakibatkan revolusi informasi yang mempengaruhi seluruh dunia (Nugroho, 2010:1-5).

Era *cyber space* sekarang ini, dunia telah terintegrasi menjadi satu sistem yang tanpa batas. Informasi bagi suatu organisasi merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting untuk dikelola seperti halnya sumber daya lainnya: 1). *Man*; 2). *Money*; 3). *Material*; 4). *Machine*; 5). *Method*. Lima sumber daya tersebut adalah sumber daya fisik, yang memiliki wujud, sementara sumber daya informasi merupakan sumber daya konseptual, yang digunakan oleh para manajer untuk mengelola sumber daya fisik. Sumber daya informasi ini meliputi: informasi dan data, perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, para spesialis informasi, pemakai, fasilitas, database. Organisasi dalam operasinya selalu memerlukan sistem-sistem untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melihat kembali, dan menyalurkan informasi. Peran informasi dalam organisasi bagaikan darah dalam tubuh manusia, informasi membawa makanan dan oksigen segar ke seluruh tubuh organisasi, sekaligus membuang kotoran (Nugroho, 2010:8-9).

Informasi semakin disadari sebagai sumber daya organisasi yang perlu dikelola dengan baik. Hal ini disebabkan oleh: 1). Kegiatan bisnis semakin kompleks, terkena pengaruh ekonomi

global, harus bersaing dalam pasar internasional, melalui telepon maupun internet, serta teknologi yang semakin kompleks. Kendala-kendala sosial mulai muncul, seiring pesatnya perkembangan TIK; 2). Kemampuan komputer makin baik, dari segi kemampuan, kemudahan, harga, yang membuat pemrosesan informasi semakin mudah, cepat, dan tepat. Di samping didukung juga oleh perkembangan teknologi komunikasi dan jaringan komputer yang pesat (Nugroho, 2010:9). Saat ini sudah dimulai usaha ke arah konvergensi teknologi, yang digambarkan dengan adanya tiga komponen: komunikasi, isi, dan komputasi (pemrosesan oleh komputer). Masing-masing berlatar belakang komponen suara, video, dan data yang secara bersama-sama disebut dengan istilah multimedia. Oleh karena fasilitas teknologi dapat menyediakan secara interaktif maka disebut multimedia interaktif. Perkembangan tersebut mengakibatkan perubahan dari ekonomi industri ke arah ekonomi informasi. *Information and Communication Technology* (ICT) mengubah cara manusia: bekerja, belajar, berbelanja, mengelola perusahaan dan pemerintahan. Kesemuanya dikembangkan dengan menggunakan teknologi digital. Pemanfaatan ICT secara meluas mendorong dunia menuju tatanan baru yang disebut “*knowledge based economy*” atau “*the digital lifestyle*”. Di lain pihak terjadinya perbedaan pemanfaatan ICT telah memperlebar jurang yang sering dikenal sebagai “*the digital divide*”/kesenjangan digital.

Pengembangan kelembagaan TIK, menurut Djunaedi (2006), sering dibahas di dunia usaha, baru kemudian diproyeksikan kemungkinannya untuk diimplementasikan pada lembaga pemerintah. Hal ini disebabkan dunia usaha dalam kenyataannya lebih dahulu memanfaatkan TIK daripada lembaga pemerintah. Adapun perkembangan manfaat TIK adalah sbb:

Tabel 1: Perkembangan Manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi

| Gelombang ke | Tujuan Umum | Mulai Tahun |
|--------------|---|---------------|
| 1 | Pengurangan biaya | 1960-an |
| 2 | Peningkatan nilai investasi | 1970-an |
| 3 | Pengkayaan produk dan layanan | 1980-an |
| 4 | Pengkayaan proses dan pembuatan keputusan eksekutif | Akhir 1980-an |
| 5 | Peningkatan komunikasi dengan pelanggan | 1990-an |

Sumber: Djunaedi (2006).

Gelombang ke-1: berfokus pada peningkatan produktivitas perorangan dan bidang-bidang kerja. Tujuan yang diwujudkan dengan otomatisasi proses kerja ketatausahaan dan administratif (terjadi penghematan). Gelombang ke-2: berfokus pada pemanfaatan TIK sebagai aset untuk peningkatan keuntungan (*cash flow* dan pengembalian investasi). Gelombang ke-3: 1). Memanfaatkan kecanggihan TIK untuk membuat produk dan/layanan baru; 2). Mencakup pula orientasi ke luar/*outward looking*: pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan. Gelombang ke-4: 1). Mengubah struktur organisasi secara fundamental; 2). Pengembangan SM kerja secara *real time*. Gelombang ke-5: 1). Memanfaatkan internet, teknologi *web* dan *e-commerce* untuk meningkatkan komunikasi dengan pelanggan; 2). Membuat layanan-layanan baru dengan pemanfaatan TIK tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa TIK dimanfaatkan dalam strategi bisnis, dan ketinggalan dalam pemanfaatan TIK bagi dunia usaha berarti kalah bersaing. Apabila dikomparasikan dengan lembaga pemerintah, maka ketinggalan dalam pemanfaatan TIK berarti kalah bersaing dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima.

Pergeseran Ketugasan Kelembagaan TIK

Kasus pada dunia usaha (Djunaedi, 2006), telah terjadi pergeseran ketugasan kelembagaan TIK. Awalnya ketugasannya meliputi: 1). Mengelola pengoperasian pusat data; 2). Mengelola sistem jarak jauh dan jaringan; 3). Melakukan analisis sistem; 4). Membangun sistem baru; 5). Merencanakan sistem-sistem; 6). Mengidentifikasi peluang sistem-sistem baru. Selanjutnya pergeseran ke arah: 1). Sistem terdistribusi, *outsources*; 2). Tim-tim multi fungsi; 3). Beli *software*, menggunakan konsultan, *outsourcers*. Serta adanya tambahan tugas baru: 1). Mengintegrasikan sistem-sistem (yang dibeli/dibuat); dan 2). Menjembatani pengadaan sistem/*software* baru.

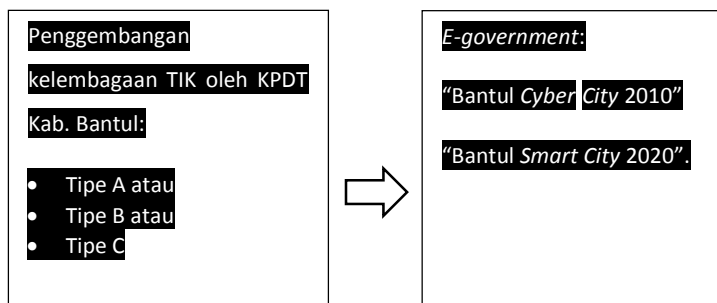
Metamorfosis lembaga TIK secara umum meliputi 3 tipe (Djunaedi, 2006), yaitu:

1. Tipe A: sentralisasi; data manual dikirim ke pusat pengolahan data elektronik. Lembaga TIK tipe A berperan sebagai: a). Penyedia utama layanan; b). Pembuat program sendiri;

- c). Melakukan *data entry* sendiri; d). Ahli teknologi dan penentu standard; e). Penentu spesifikasi program-program komputer.
2. Tipe B: terdistribusi; *software* disebarluaskan; data di-*entry* dari tiap-tiap institusi. Lembaga TIK tipe B berperan sebagai: a). Penyedia yang diharapkan: aplikasi/*software* yang dibuat/dibeli disebarluaskan ke semua instansi; b). Spesialis pemilih/penentu *software* yang dibeli dari luar/dibuat; c). Pemelihara/penjaga standard teknis untuk *hardware*, *software* yang dipakai semua instansi; d). Analisis alur informasi dan sistem kerja/bisnis (analisis *workflow* dan analisis untuk pengembangan aplikasi mewadahi *workflow*).
 3. Tipe C: terintegrasi; setiap instansi membuat sistem; semua sistem diintegrasikan. Lembaga TIK tipe B berperan sebagai: a). Pemasok yang bersaing; b). Spesialis tren/kecenderungan perkembangan TIK; c). Pengintegrasian sistem-sistem yang dibeli/dibuat; d). Berkontribusi dalam tim analisis multidisipliner; e). Tren: layanan satu atap (sistem terintegrasi); f). Penciptaan/pengembangan layanan inovatif; g). Penciptaan/pengembangan layanan inovatif terpadu satu sistem/satu tempat/satu atap

Arah pembangunan TIK di Indonesia pasca Detiknas, TIK diharapkan dapat memberi manfaat dalam beberapa hal berikut (Detiknas, 2007 dalam PAP Bantul, 2008): 1). Mendukung dan mempercepat perkembangan sosial dan ekonomi; 2). Mengatasi berbagai kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung suatu sistem yang lebih adil dan makmur; 3). Meningkatkan akses informasi dan pengetahuan; 4). Meningkatkan kemampuan SDM; 5). Mendukung proses demokrasi dan transparansi birokrasi; dan 6). Membentuk masyarakat informasi (*knowledge society building*).

Kerangka Pikir



Melihat gambar di atas, pengembangan kelembagaan TIK oleh KPDT Kab. Bantul dalam rangka pelaksanaan *e-gov*, dengan visinya “Bantul *Cyber City*2010/Bantul *Smart City* 2020”, peneliti menganalisis tentang keberadaan KPDT berada pada tingkatan pengembangan kelembagaan yang mana, di antara 3 tipe: Tipe A, B, atau C, berdasarkan kriteria yang telah diuraikan di atas. Sehingga pertanyaan penelitiannya: 1). Bagaimana peran dan fungsi KPDT Kab. Bantul dalam pengembangan kelembagaan TIK?; 2). Bagaimana proses pengembangan kelembagaan TIK di Kab. Bantul?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan mengetahui bagaimana peran dan fungsi KPDT Kab. Bantul, dan mengungkapkan bagaimana pengembangan kelembagaan TI di Pemkab Bantul.

Pembahasan

Deskripsi Kabupaten Bantul

Melalui Inpres No.3/2003 3 Juni 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Gov*, pemerintah mengintruksikan kepada seluruh instansi pemerintah, pusat maupun daerah, untuk mengimplementasikan *e-gov* dalam upaya memfasilitasi kegiatan masyarakat dan kalangan bisnis untuk mewujudkan perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Melalui pengembangan *e-gov* dapat dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah pusat dan daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan TIK.

E-gov merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat luas, dengan pemanfaatan teknologi telematika, khususnya internet. Masyarakat luas dapat memonitor dan memberikan masukan secara *real-time*, tentang segala sesuatu yang sedang/akan dilakukan oleh pemerintah. Selain itu masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan kritik serta saran, yang secara langsung diterima oleh pemerintah. Potensi layanan dan strategi implementasi *e-gov* dapat diaplikasikan guna mendukung otda, sehingga

pelayanan lebih efektif, efisien dan transparan. Kemajuan TIK membawa dampak/manfaat yang besar, banyak institusi pemerintah yang menggunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat, baik dengan SMS atau via *e-mail* yang disediakan *website* milik pemerintah. *Website* memberikan gambaran *output* suatu organisasi/lembaga, layanan dan potensi yang disediakan. *Web* menawarkan kemungkinan untuk pemberian layanan *just in time*, pengambilan informasi yang lebih cepat, penawaran jasa, dsb. Dalam satu jendela dapat dilakukan berbagai macam akses informasi bahkan juga beberapa transaksi.

Web merupakan salah satu bagian dari kegiatan implementasi *e-gov*. Tahun 2001 Kabupaten Bantul telah membangun situs dengan alamat www.bantulonline.com tetapi mengalami kegagalan, sehingga disempurnakan dengan mengganti alamat www.bantul.go.id dan www.bantulbiz.com. Dengan *website* tersebut membuka pintu akses bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan, dan aspirasi kepada pemerintah. Begitu pula sebaliknya dari pemerintah dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan cepat, efektif, dan transparan. Kendati masih banyak kendala, namun sudah dapat membantu menyampaikan informasi dengan cepat.

Gambar 3: Website Pemkab Bantul: bantulkab.go.id



Sumber: KPDT Bantul 2016

Sesuai dengan visi Pemkab Bantul: Bantul ProjoTamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis; serta misi: 1. Mewujudkan masyarakat Bantul yang sejahtera
Volume V Nomor 2 Desember 2016 177

lahir dan batin berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME, (berkaitan dengan aspek sejahtera dan agamis); 2. Mewujudkan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang demokratis (berkaitan dengan aspek demokratis). Maka Pemkab Bantul menyediakan fasilitas infrastruktur layanan informasi dan komunikasi Kab. Bantul, melalui: 1). Kontak person/*in person*; 2). Surat menyurat/*US Mail*; 3). Telepon; 4). Fax; 4). *Short Massage Servis/SMS*; 5). 3 buah portal yang dibangun: a). Internet /*website*: www.bantul.go.id, www.bantulbiz.com, dan www.bantulcraft.com. b). Intranet: SIMDA Terintegrasi.

Tipe layanan yang dikembangkan di Kab. Bantul, meliputi:

1. G2C: penerapan TIK yang berfungsi melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Macam layanan sesuai bidang: a). Administrasi Kependudukan; b). Pendidikan; c). Perhubungan; d). Pertanian dan Pangan; e). Peternakan dan Perikanan; f). Kesehatan; g). Perdagangan; h). Kios informasi *online* di setiap desa; i). Kios telepon gratis ke instansi pemerintah.
2. G2B: penerapan TIK yang berfungsi melayani kebutuhan dan kepentingan pelaku bisnis/pengusaha/swasta. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA); a). Perizinan berbasis komputer *online*; b). Sistem informasi dan komunikasi melalui *website* yang memberikan layanan promosi dan menjembatani antara pelaku bisnis dan pasar berskala internasional (www.bantulbiz.com dan www.bantulcraft.com); c). Informasi potensi bisnis di masyarakat.
3. G2G; a). Akses data penduduk Bantul *online* ke dinas/instansi terkait; b). Akses data penduduk Bantul *online* ke dinas/instansi vertikal (pemprov, pemerintah pusat); c). SIAK untuk KTP *Online*; d). Pengiriman data PNS ke PT. Taspen; e). Akses data penduduk miskin *online* ke instansi terkait; f). Akses data tenaga kerja *online*.

Pengembangan TIK di Pemkab Bantul dilatar-belakangi oleh hal berikut; 1). Kemajuan dan perkembangan TIK/*ICT*; 2). Pola pikir masyarakat yang menuntut diri mampu bersaing dalam berbagai aktivitas, khususnya dalam dunia usaha; 3). PP melalui Inpres No.3/2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, yang selanjutnya disederhanakan dengan Permendagri No.24/2006 tentang Strategi

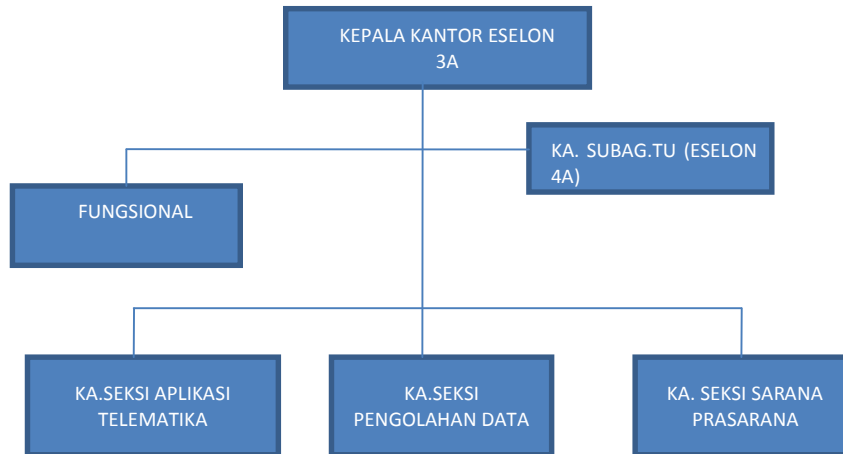
Pelayanan Publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta mencerminkan keterbukaan informasi; 4). Pelayanan satu atap yang harus mempunyai basis data dengan menggunakan SIM dan wajib menyediakan dan menyebarkan informasi, berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan, serta tata cara pengaduan; 5). Mewujudkan pelayanan publik secara prima sesuai visi misi Pemkab Bantul; 6). Upaya Pemkab. Bantul menuju *e-gov*.

Kantor Pengolahan Data Telematika

Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Bantul dibentuk dengan Perda No.34/2000. KPDE merupakan embrio dari Kantor Pengolahan Data Telematika (KPDT), yang berubah nama berdasarkan Perda No.17/2007 tentang Pembentukan KPDT sebagai Organisasi Lembaga Teknis Daerah bidang TIK di lingkungan Pemkab Bantul. Selanjutnya dikeluarkan Perbup Bantul No.91/2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja KPDT Bantul. KPDT memiliki Visi: Terwujudnya Bantul yang informatif melalui pembangunan SI dan Komunikasi Berbasis Teknologi, Terintegrasi, Berkesinambungan dan Ramah Lingkungan. Untuk mencapai Visi tersebut, diperlukan kegiatan yang tertuang dalam Misi: 1). Meningkatkan pelayanan informasi data yang berkualitas dan memadai bagi berbagai pemangku kepentingan; 2). Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel guna meningkatkan pelayanan prima serta mencapai *good governance*; 3). Mengembangkan SIM berbasis Teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya saing .

Susunan Organisasi KPDT, terdiri atas; 1). Kepala Kantor; 2). Sub Bagian Tata Usaha; 3). Seksi Pengolahan Data; 4). Seksi Aplikasi Telematika; 5). Seksi Sarana dan Prasarana; 5). Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasi KPDT adalah:

Gambar 5: Struktur Organisasi KPDT Kabupaten Bantul



Sumber: KPDT Kab.Bantul 2016

Berdasarkan Perda No.16/2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemkab Bantul, pasal 27, kedudukan KPDT merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemda yang dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika.

Fungsi dan Peran KPDT Kab. Bantul dalam Pengembangan TIK

Sesuai dengan Perbup No.91/2007 pasal 8, fungsi KPDE sbb: 1). Perumusan kebijakan teknis TI; 2). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum TI; 3). Pembinaan dan pengendalian TI; 4). Melaksanakan ketatausahaan kantor; 4). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Gambar 6: Transformasi Government Menuju e-Government



Sumber: KPDT Bantul 2016

Dampak perubahan menuju Pemerintahan berbasis *e-Gov* tentunya sangat tergantung dengan: a). Penggunaan Internet; b). Penggunaan Infrastruktur Telematika; c). Penggunaan Sistem Aplikasi; d). Standarisasi Metadata; e). Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik; f). Sistem Dokumentasi Elektronik. Untuk memperoleh hasil optimal dari proses pembangunan/pengembangan *e-Gov*, maka KPDT berperan dalam bidang tehnik dan metode pembangunan/ pengembangan secara menyeluruh/*holistik* dari seluruh komponen yang mendukung dan saling terhubung/terintegrasi baik dari perencanaan, pelaksanaan maupun penerapan sistem informasi. KPDT selanjutnya menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk dapat berperan optimal sesuai fungsinya. Renstra yang telah disusun adalah:

1. Renstra 2006-2010

Landasan Penyusunan Renstra KPDE (2006-2010), adalah: a). UU No.32/2004 (Perubahan UU No.22/1999); b). UU No.25/2004; c). Inpres No.3/2003; d). Inpres No.6/2001; e). Kepmendagri No.45/1992; f). Kepmendagri No.148/1997; g). Surat Menkominfo 17 Juni 2002 No.126/M/KI/VI/2002 perihal Pendayagunaan Situs/*Website* di Pusat dan Daerah; h). Perda Kab.Bantul No.34/2000.

Adapun visi misi KPDT sbb: a). Visi KPDE: Bantul *Cyber City* 2010; b). Misi KPDE: i). Mewujudkan Sistem Informasi (SI) dan Sistem Manajemen (SM) Pengelolaan Pelayanan Masyarakat yang Prima; ii). Mewujudkan SI dan SM Pengelolaan Pendidikan yang Berkualitas; iii). Mewujudkan SI dan SM Pengelolaan Kesehatan Masyarakat yang Profesional; iv). Mewujudkan SI dan

SM Pengelolaan Potensi Daerah yang akurat untuk perencanaan dan mengambil kebijakan; v). Mewujudkan SI dan SM Pengelolaan *Back Office* yang handal.

2. Renstra 2011-2015

Latar belakang penyusunan Renstra 2011-2015, adalah bahwa UU No.32/2004 sebagaimana telah berubah menjadi UU No.12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32/2004 tentang Pemda, memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur/menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, menurut prakarsa dan kreativitas masing-masing. Untuk mewujudkannya diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, menengah, maupun tahunan seperti diamanatkan oleh UU No.25/2004 tentang SPPN.

Renstra disusun untuk 5 tahun dan diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Meskipun dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah, namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu pada visi misi Bupati Bantul. Adapun maksud penyusunan Renstra KPDT adalah; a). Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi KPDT; b). Merupakan kerangka dasar bagi KPDT dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; c). Memberikan arah dan tujuan yang akan dicapai KPDT selama 5 tahun ke depan; d). Memberi acuan dalam menyusun Renja KPDT TA 2011-2015.

Sementara itu, tujuan penyusunan Renstra KPDT adalah: a). Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; b). Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada penyelesaian masalah yang mendasar.

Landasan hukum penyusunan Renstra KPDT Kab. Bantul, adalah: a). UU No.15/1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan DIY; b). UU No.25/2004; c). UU No.32/2004; d). UU No.33/2004; e). UU No.11/2008; f). PP No.25/2000 g). PP No.56/2001; h). PP No.19/2006; i). PP No.38/2007; j). Perpres No.7/1999; k). PP No.41/2007; l). Perda Kab.Bantul No.16/2007; m). Perbup No.91/2007.

Adapun hubungan Renstra KPDT Bantul 2011-2015 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab.Bantul 2011-2015, adalah bahwa Renstra KPDT Bantul merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan jabaran teknis dari RPJMD 2011-2015 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program 5 tahun ke depan.

Visi dan misi KPDT Bantul sesuai Renstra 2011-2015 adalah sbb: a). Visi: Terwujudnya Bantul yang informatif melalui pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi berbasis teknologi terintegrasi, berkesinambungan dan ramah lingkungan; b). Misi: i). Meningkatkan pelayanan informasi data yang berkualitas dan memadai bagi berbagai pemangku kepentingan; ii). Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan pelayanan prima serta mencapai *good governance*; iii). Mengembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi berbasis teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya saing.

3. Renstra 2016-2025

Visi pembangunan Pemkab. Bantul adalah: Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis. Misi Pemkab Bantul yaitu: a). Meningkatkan kapasitas pemda menuju tata kelola pemerintah yang empatik; b). Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan iptek; c). Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan

ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender; d). Meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan.

Dalam rangka sinergitas pusat dan daerah maka tema pembangunan daerah Kab. Bantul 2015 diselaraskan dengan mempertimbangkan tema pembangunan nasional dalam rencana kerja pembangunan 2015 serta tema pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DIY 2015. Tema pembangunan nasional 2015 adalah: Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan, sesuai dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) dari RPJPN 2005-2025 yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus meningkat. Tema pembangunan DIY sebagaimana tercantum dalam RKPD DIY 2015 adalah: Memperkuat SDM dan Mendayagunakan Potensi Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan.

Dalam kurun 2016–2021 KPDT Bantul harus mampu mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan Kab. Bantul sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika untuk mewujudkan pemerintahan yang empati dan berpihak pada masyarakat melalui pelayanan prima. Berdasarkan uraian di atas, KPDT Bantul menetapkan visi: Terciptanya Bantul Cerdas melalui Pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi berbasis Teknologi, Terintegrasi, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Selanjutnya Visi dijabarkan dalam misi KPDT Bantul yaitu: a). Meningkatkan pelayanan data dan informasi yang berkualitas dan memadai bagi berbagai pemangku kepentingan; b). Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel guna meningkatkan pelayanan prima serta mencapai *good governance*; c). Mengembangkan Sistem Informasi dan

Komunikasi berbasis teknologi, terintegrasi, berkelanjutan, ramah lingkungan dan berdaya saing.

Adapun rencana KPDT Bantul dalam pengembangan fasilitas TIK 5 tahun ke depan yaitu: a). Layanan Akses Internet dan intranet yang memadai (*Bandwidth* tersedia di atas 200 Mbps); b). Infrastruktur Jaringan Layanan Kesehatan; c). Infrastruktur Jaringan Layanan Pendidikan; d). Integrasi Data dan SI di berbagai Sektor Penyelenggaraan Dokumen secara elektronik; e). Penerapan Sistem Informasi Desa di 75 Desa; f). Kinerja Pegawai berbasis TIK (*Single Payment*); g). Penyediaan dan penataan Ruang Pelatihan TIK yang baru (di komplek Manding). Minimal Gedung yang memiliki 2 Ruang Kelas dengan kapasitas 25 komputer/peserta.

Berdasarkan sumber daya dan permasalahan KPDT, diproyeksikan pencapaian program 5 tahun ke depan (Renstra KPDT 2016-2021), sbb: a). Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan SKPD, Kecamatan, Desa, Puskesmas, UPT Pendidikan, *Telecenter* Kecamatan, dan Sekolah Pendidikan Dasar secara bertahap (TA 2016–2020); b). Pembangunan dan Penyempurnaan Aplikasi SI Keuangan berbasis Akrual, Sistem Pelayanan Terpadu Kecamatan Terintegrasi; c). Pembangunan dan Pemeliharaan *Warehouse Data* dan *Data Mining*; d). Pemeliharaan dan Manajemen Data Terpusat dan Berkas Data (*file*); e). Peningkatan SDM bidang TIK; f). Pembuatan SOP dalam rangka menumbuhkan komitmen dan penyamaan persepsi semua *stakeholders* tentang pentingnya suatu data dan informasi dalam proses pengambilan keputusan; g). Pemeliharaan dan peningkatan sarana informasi berupa *Website*, *SMS Center* dan *Telecenter*; h). Melaksanakan kegiatan migrasi dan bimbingan teknis *open source software*.

Proses Pengembangan Kelembagaan TIK di Kabupaten Bantul

1. Analisis KPDT Terhadap Kondisi Pemanfaatan TIK

Analisis KPDT terhadap kondisi pemanfaatan TIK Pemkab Bantul pada 2006 adalah sbb: a). *Leadership*, belum semua pimpinan instansi mengerti dan

mau memanfaatkan TI; b). Infrastruktur jaringan, belum semua instansi/daerah ada infrastruktur jaringan yang memadai; c). *Hardware*, belum semua instansi mempunyai *hardware* memadai; d). Perangkat *software*, sering berubahnya aturan main yang ditetapkan dan belum semua aplikasi dibuat; e). Data, sering terjadinya duplikasi dan penyediaan data primer yang kurang akurat; f). SDM, masih terbatasnya SDM yang mampu dan berminat dalam memanfaatkan TI.

Berdasarkan hasil analisis KPDT tersebut, disusun rencana kegiatan untuk mencapai visi dan misi KPDT 2007-2011, yaitu pembangunan: a). *Ware House Data/ Pusat Data*; b). Infrastruktur jaringan; c). Penyempurnaan *software*; d). Tempat pelatihan dan perbengkelan; e). Memenuhi kebutuhan *hardware*.

2. Program dan Kegiatan KPDT Bantul 2006-2016

Program kegiatan pemanfaatan/pengembangan TIK 2006-2015 yang telah dilakukan KPDT:

- a. Regulasi yang mengatur pengembangan, pemanfaatan dan pengolahan TIK: 1). SE Bupati pemanfaatan dan penggunaan *Software* legal/penggunaan *Open Source Software* (OSS); 2). Instruksi Bupati untuk penggunaan *e-mail* Resmi Dinas Pemkab Bantul; 3). Perbup SOP Pengembangan dan Pengelolaan TIK; 4). Perbup Tata Naskah Dinas secara Elektronik (TNDE).
- b. Penyediaan infrastruktur jaringan internet dan intranet antar SKPD seluruh kecamatan, Pemdes dan beberapa unit Puskesmas di lingkungan Pemkab Bantul.
- c. Penyediaan Layanan Internet Masyarakat di Pusat Informasi, Teknologi dan Bisnis (PITB) di Pasar Seni Gabusan (PSG) yang bertujuan memudahkan dan mendekatkan masyarakat pada perkembangan TIK.
- d. Penyediaan 3 *Telecenter* di Desa Pusat Industri dan Kerajinan: 1). Desa Santan pada Kerajinan Tempurung (Cumplung Aji); 2). Museum Budaya di Desa Kebun Agung dan Tani; serta 3). Desa Tembi pusat Kerajinan kayu dan bambu.
- e. Pembangunan *Warehouse Data* dan penyediaan *Hosting* sebagai layanan ruang data, akses data dan sekaligus pusat penyimpanan data.
- f. Penyediaan 270 *email* resmi Pejabat, SKPD, Kecamatan, Desa dan Puskesmas.

- g. Pembangunan Aplikasi SI berbasis Teknologi: 1). www.bantulkab.go.id (pemerintahan); 2). www.bantulbiz.com (bisnis dan perdagangan); 3). www.bantulcraft.com (industri dan kerajinan); 4). warintek.bantulkab.go.id (warung informasi berbagai teknologi); 5). Perijinan.bantulkab.go.id (ruang informasi layanan perijinan secara *online*); 6). Invesda.bantulkab.go.id (investasi dan Pembangunan); 7). Subdomain www.bantulkab.go.id terdiri dari seluruh SKPD Pemkab Bantul; 8). PUPNS.bantulkab.go.id: sistem pengolahan data ANS *online*; 9). CPNS.bantulkab.go.id: fasilitas sistem layanan pendaftaran *online*; 10). Kewilayahan.bantulkab.go.id (RDTRK dan layanan Perencanaan Pembangunan/*Advice Planing*); 11). SIM Monografi: ruang data dan informasi monografi kecamatan; 12). SIM Keuangan, SIM Barang Daerah, SIM Layanan Reklame, SIM Layanan BPHTB, SIM Pengolahan data PBB; 13). *e-Health* (SIM Kesehatan); 14). SIM Layanan RSUD; 15). SIM Layanan KTP dan KK; 16). SIM Penanggulangan Kemiskinan; 17). SIM Uji kendaraan bermotor; 18). SIM Potensi Wisata dan kuliner; 19). SIM Administrasi Kesiswaan; 20). SIM Pelaporan Layanan Kesehatan Masyarakat; 21). SIM PATEN.
- h. Peningkatan Sarana Komputer/*Hardware* dan pendukungnya: 1). Sarana pendukung jaringan: pengadaan jaringan fiber optic di Komplek Parasamya dan Perkantoran Manding; 2). Sarana *warehouse data*: pengadaan server, rak server dan perlengkapannya; 3). Sarana peningkatan kemampuan SDM: pengadaan komputer untuk pelatihan; 4). Sarana Kerja: pengadaan *notebook* dan komputer; 5). Sarana pengembangan aplikasi: pembelian *software* legal diantaranya Window Server 2000, 2008 dan MS SQL.
- i. Peningkatan SDM melalui pelaksanaan Bimtek: 1). Administrasi Perkantoran berbasis Komputer; 2). Jaringan computer; 3). Perakitan dan *trouble shooting* perangkat keras computer; 4). *Trouble shooting* dan pemanfaatan perangkat lunak; 5). Pengolahan database; 6). Pengembangan dan rekayasa aplikasi sistem; 7). Aplikasi SI pengolahan data; 8). SI Desa.

3. Rencana Program KPDT Kabupaten Bantul 2016-2021

KPDT Bantul, memiliki rencana program (Renstra KPDT 2016-2021), yaitu: a). Pelayanan Administrasi Perkantoran; b). Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; c). Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; d). Fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi. e). Kerjasama Informasi dengan Mass Media. Program kerja yang telah ditetapkan di atas, dimulai pada 2016. Berikut target dan capaian perkembangan TIK di Kab. Bantul 2016:

Tabel 5: Target dan Capaian Perkembangan TIK di Kab. Bantul 2016

| | Target | Capaian |
|--|--|---|
| | Infrastruktur Jaringan Internet dan Intranet SKPD | |
| | a. Jaringan WAN SKPD, Kecamatan (17), Desa (75) dan Puskesmas (27) | a. Jaringan WAN SKPD, Kecamatan (17), Desa (75) dan Puskesmas (8) |
| | b. Layanan Wifi di SKPD, Kecamatan dan Desa (75) | b. Layanan Wifi di SKPD, Kecamatan dan Desa (32) |
| | c. <i>Warehouse</i> data representatif | c. <i>Warehouse</i> data belum representatif |
| | - Tersedia Power Listrik 13.000 Watt | - Belum Tersedia Power Listrik 13.000 Watt |
| | - Tersedia AC stabil | - Belum Tersedia AC stabil |
| | - Genzet 30 KVA | - Belum tersedia Genzet 30 KVA |
| | - Penambahan Luas Ruangan | |
| | Aplikasi Sistem Informasi | |
| | a. <i>Single Windows</i> | a. Usulan Anggaran 2017 |
| | b. SIM PATEN | b. Aplikasi ada, masih butuh DP3 |
| | c. SIM Perencanaan Pemb. Desa | c. Proses pembangunan |
| | d. SIM Desa (75 Desa) terpasang | d. Aktif <i>Update</i> 30 Desa |
| | e. Aplikasi <i>Single Payment</i> | e. Rencana Tahun 2017 |

Sumber: KPDT Kabupaten Bantul 2016

Dari tabel 5 dapat dilihat beberapa target KPDT Bantul belum dapat dicapai pada 2016. Di antaranya adalah jaringan WAN yang ditargetkan untuk

27, baru mencapai 8 Puskesmas, layanan Wifi yang ditargetkan untuk 75, baru mencapai 32 desa. Target tersedianya Power Listrik 13.000 Watt, AC stabil, dan Genzet 30 KVA, hingga akhir 2016 belum tersedia.

Pemerintah pusat dan beberapa institusi terkait memberikan stimulus bagi pemda, provinsi maupun kab./kota dalam pembangunan TIK. Berbagai kategori penilaian ditujukan untuk mendorong pengembangan TIK. Berikut beberapa bukti keberhasilan KPDT Bantul, yaitu penghargaan: 1). *Warta Ekonomi E-Government Award Nominator 10 besar 2004*; 2). *Depdagri Inovation Favorite website E-Government Award Tahun 2005*; 3). *Warta Ekonomi E-Government Award website terbaik kategori Kabupaten 2008*; 4). *User Friendly pada E-Government Award 2009*; 5). *Inovation Website pada E-Government Award 2009*; 6). Kategori “*Averall Society*” *Pembangunan e-government 2012*; 7). *Kategori “Averall Society” Indonesia Digital Society Award (IDSA) Runner UP 2014*; 8). *Peraih Peringkat Tertinggi I Evaluasi Kinerja SKPD 2015*

Kesimpulan

Sesuai analisis maka peneliti dapat menyimpulkan sbb:

1. Proses pengembangan kelembagaan TIK di Kab. Bantul dimulai dengan dibentuknya KPDE melalui Perda Kab. Bantul No.34/2000, embrio dari KPDT, yang berubah nama berdasarkan Perda No.17/2007 tentang Pembentukan KPDT sebagai Organisasi Lembaga Teknis Daerah bidang TIK di lingkungan Pemkab Bantul. Selanjutnya Perbup Bantul No.91/2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja KPDT Kab. Bantul.
2. Sesuai Perbup No.91/2007 pasal 8, fungsi KPDT adalah: a). Perumusan kebijakan teknis TI; b). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum TI; c). Pembinaan dan pengendalian TI; d). Melaksanakan ketatausahaan kantor; e). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Peran KPDT menuju transformasi pemerintahan berbasis *e-gov* adalah sebagai ujung tombak dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
4. Pengembangan kelembagaan TIK oleh KPDT Kabupaten Bantul dituangkan dalam Renstra: a). 2006-2010; b). 2011-2015; c). 2016-2021.
5. Proses Pengembangan Kelembagaan TIK oleh KPDT dilakukan dengan melakukan: a). Analisis Terhadap Kondisi Pemanfaatan TIK; b). Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan KPDT Bantul 2006-2016; c). Penyusunan Rencana Program KPDT Bantul 2016-2021.
6. Metamorfosis KPDT Bantul saat ini, menurut kriteria secara umum tingkatan pengembangan kelembagaan berada pada Tipe B.

Saran

Untuk pengembangan kelembagaan TIK oleh KPDT Bantul, peneliti memberikan saran sbb:

1. Meningkatkan pengetahuan tentang TIK aparat pemerintah (staf sampai ke pimpinan) melalui bimtek dan pelatihan yang inovatif, serta memberikan stimulus dengan penilaian kinerja pegawai berbasis TIK.
2. Untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur secara optimal, maka perlu memotivasi terbentuknya petugas-petugas teknis TIK yang bertanggung jawab dalam mengelola TIK di setiap instansi;
3. Untuk mendukung perubahan KPDT menjadi Dinas Kominfo, diperlukan pemanfaatan semua potensi TIK dalam rangka meningkatkan eksistensi KPDT Bantul;
4. Untuk mengurangi kesenjangan digital, perlu penyelenggaraan berbagai Lomba Bidang TIK, seperti: a). Membuat Blog untuk pelajar SMA/SMK; b). Membuat Blog untuk masyarakat umum; c). Membuat Desain *Website* untuk pelajar; d). Membuat Desain *Website* untuk masyarakat umum; e). Membuat *Website* Subdomain SKPD bantulkab.go.id; dll.

5. Meningkatkan kesadaran pada seluruh pengguna aplikasi untuk melakukan *up date* data, secara *on time* dan rutin, serta meninggalkan ego sektoral.

Daftar Pustaka

- Anto. 2010. *Aplikasi Komputer Pemanfaatan e-Government dalam Pemerintah*, dalam <http://subektianto.blogspot.com>, diakses 6 Maret 2011
- Depkominfo, 2008. *Kondisi Situs Web Pemerintah Daerah*, dalam www.depkominfo.go.id, diakses 11 Oktober 2010
- Djunaedi, A. 2002. *Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makalah dalam Seminar Nasional E-Government dan Workshop Linux, Yogyakarta, 30 Oktober 2002
- Hartati, S. 2002. *Karakter E-Government*, Makalah dalam Seminar Nasional E-Government dan Workshop Linux, Yogyakarta, 30 Oktober 2002
- Jogiyanto. 2003. *Sistem Teknologi Informasi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta
- Moleong, L. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakara, Bandung.
- Nugroho, Eko. 2010. *Sistem Informasi Manajemen, Konsep, Aplikasi, dan Perkembangannya*, CV. Andi Offset, Yogyakarta
- PAP Bantul. 2008. *E-Government*, Makalah dalam Seminar Nasional *E-Government*, MAP UGM Yogyakarta, 24 Desember 2008
- Prahalad, C.K. 2005. *The Fortuneat The Bottom of the Pyramide: Eradicating Poverty through Profits*. Upper Saddle River, N.J: PearsonEducation, Inc.